

**PERLINDUNGAN HUKUM WANITA YANG *MULIH DAHA* DI DESA
TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR BALI DITINJAU DARI HUKUM
WARIS ADAT BALI DI DESA ADAT TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
BALI**

Alfonsus Mario Dimas Rahadyan Bayu
Jurusan/Program: Hukum/ Ilmu Hukum
Pembimbing:
Bebeto Ardyo, S.H.,M.H.
Fransisca Yanita Prawitasari, S.H.,M.Kn.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap wanita Mulih Daha di Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, dalam perspektif hukum waris adat Bali. Wanita Mulih Daha adalah perempuan yang kembali ke keluarga asal setelah bercerai atau kehilangan suami. Dalam sistem hukum adat Bali yang cenderung patrilineal, hak waris perempuan sering kali terbatas. Namun, Awig-Awig Desa Tegallalang, khususnya Palet 4 Pawos 66, memberikan hak kepada wanita Mulih Daha untuk menjadi ahli waris, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3134 K/PDT/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tegallalang mulai menyesuaikan diri dengan perubahan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih adil kepada perempuan. Namun, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi tantangan dari budaya patriarkal yang kuat. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan gender dalam masyarakat adat.

Kata kunci: Mulih Daha, hukum waris adat Bali, perlindungan hukum, Desa Tegallalang, kesetaraan gender.

**LEGAL PROTECTION OF RECOMMENDED WOMEN IN TEGALLALANG
VILLAGE, GIANYAR DISTRICT, BALI, REVIEWED FROM THE BALI
TRADITIONAL INHERITANCE LAW IN TEGALLALANG VILLAGE, GIANYAR
DISTRICT, BALI**

Alfonsus Mario Dimas Rahadyan Bayu
Department/Program: Law/Legal Studies

Advisors:

Bebeto Ardyo, S.H.,M.H.
Fransisca Yanita Prawitasari, S.H.,M.Kn.

ABSTRACT

The legal protection for Mulih Daha women in Tegallalang Village, Gianyar Regency, Bali, from the perspective of Balinese customary inheritance law. Mulih Daha refers to women who return to their original family after divorce or the death of a spouse. In Bali's predominantly patrilineal customary legal system, women's inheritance rights are often limited. However, the Awig-Awig of Tegallalang Village, particularly Palet 4 Pawos 66, grants Mulih Daha women the right to inherit, albeit in smaller portions than men. This research employs a normative juridical approach, analyzing the Supreme Court Decision No. 3134 K/PDT/2017. The findings reveal that Tegallalang's customary law is adapting to social changes to provide fairer protection for women. However, its implementation faces challenges from entrenched patriarchal culture. This study highlights the importance of harmonizing customary and national laws to achieve gender equality in traditional communities.

Keywords: Mulih Daha, Balinese customary inheritance law, legal protection, Tegallalang Village, gender equality.